

Menunggu KPK Menjerat Menteri

Kasus Hambalang mulai terkuak lebih lebar. Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diserahkan kepada DPR, Rabu (31/10), menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 243,6 miliar. Angka ini jauh lebih besar dari perkiraan yang sebelumnya diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni hanya sekitar Rp 10 miliar.

Sejak kasus ini menggelinging masuk ke ranah publik, sebenarnya bukan persoalan seberapa besar kerugian negara yang menjadi sorotan utama. Yang diperbincangkan dan digunjingkan banyak orang adalah dugaan keterlibatan pejabat tinggi setingkat menteri dalam kasus tersebut. Nama yang mengemuka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng. Yang dibangun dan kemudian bermasalah adalah pusat olahraga. Maka, dugaan yang mengemuka adalah ada peran menteri di dalamnya.

Namun, jika mengacu pada hasil audit investigasi BPK yang diserahkan ke DPR, dugaan yang kemudian berkembang menjadi persepsi banyak orang itu tidaklah terbukti. Tokoh utama di balik kasus yang melibatkan anggaran Rp 2,5 triliun itu, sesuai hasil audit BPK, adalah Sekretaris Kemenpora. Sesmenpora ini yang melakukan penyimpangan dengan melakukan rekayasa dalam menetapkan pemenang lelang tanpa rekomendasi atau persetujuan dari Menpora.

Lalu, dalam kasus ini di mana keberadaan Menpora? BPK ternyata hanya menemukan "kesalahan" berupa pembiaran. Sang menteri membiarkan penyimpangan dilakukan oleh Sesmenpora dengan tidak melakukan teguran. Andi Mallarangeng dinilai melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam PP itu diatur, pimpinan instansi seharusnya melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, hingga pemantauan.

Sebagaimana diketahui, audit investigasi itu dilakukan BPK atas permintaan DPR. Hasil yang sama tentu akan diserahkan juga ke KPK nantinya. Nah, harapan banyak orang kini bertumpu pada KPK. Apakah lembaga antikorupsi ini akan menjadikan hasil audit BPK sebagai acuan utama, atau akan melakukan penyelidikan tersendiri yang bisa saja hasil akhirnya nanti justru memberikan nuansa yang berbeda?

Ucapan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, bisa menjadi pegangan kita. Busyro menjamin, penyidik KPK terus bergerak mengembangkan bukti-bukti dalam kasus Hambalang sehingga bisa menjangkau nama-nama yang memang terlibat, apapun jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, jika KPK memiliki kepentingan dalam penyelidikannya untuk memanggil dan meminta keterangan dari Menpora, maka ya pasti akan dilakukan.

Pada sisi lain, ada hal yang layak kita pegang bersama. Dalam kasus seperti Hambalang ini, sejatinya semua pihak, siapapun dia, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena itu, kita tidak dalam posisi menghakimi Menpora Andi Mallarangeng. Keterkaitan sang menteri dalam kasus ini semata mengacu pada logika umum "masa sih seorang menteri tidak mengetahui perbuatan anak buahnya, terutama dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun?" Acuan lain dari keterangan beberapa saksi dan tersangka dari Kemenpora yang sudah diperiksa KPK yang menyebut dugaan keterlibatan atasannya.

Andi Mallarangeng sendiri berkali-kali membantah terlibat dalam skandal megakorupsi tersebut. Dia pun mengaku sudah menjelaskan duduk persoalan proyek yang dia ketahui ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, kita tunggu saja kelanjutan penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan KPK. (****)